

Penghampiran Masalah Pendidikan dengan Pendekatan Fenomenologi

Moh. Shochib

Abstract: The major objective of educational activity is to prepare and help our generation to be adult persons. There are too many problems faced by educators, most of them are born from the absence of educator's charisma. It is not easy to identify our educational problems properly, but we offer a phenomenological approach to be applied to find out the implicit phenomenon within or behind the explicit ones. In this approach, educational problems can be understood objectively by grammatical and historical interpretations, and subjectively by individual and generic interpretations. It is also offered a number of activities based on this phenomenological approach to find out the basic structure of educational problems.

Kata-kata kunci: masalah pendidikan, pendekatan fenomenologi.

Tindakan manusia dapat disebut tindakan pendidikan manakala didasari oleh kesadaran untuk memberikan bantuan kepada subyek didik dan memberikan makna baginya. Artinya, pendidikan mempersyaratkan adanya bantuan berupa pemberian pesan yang sarat nilai dari orang yang dipercaya (subyek didik), dan mereka menyerahkan diri untuk memperolehnya. Tindakan pendidikan selalu sarat nilai untuk dimaknai.

Kepercayaan dalam diri subyek didik melahirkan penyerahan diri untuk memperoleh bantuannya. Penyerahan diri (subyek didik) kepada pendidik untuk memperoleh bantuan mengandung arti bahwa, di mata subyek didik, pendidik memiliki wibawa. Ini menunjukkan bahwa kewibawaan merupakan syarat hakiki dalam pendidikan. Tanpa wibawa pendidik semua pesan pendidikan yang di-dialogkan atau dikomunikasikan kepada subyek didik tidak dapat disebut pesan pendidikan, karena jika mereka melakukan apa yang menjadi kehendak orang

dewasa maka mereka melakukan atas dasar ketakutan yang disebut *kepatuhan semu*.

Apa yang diuraikan di atas merupakan masalah yang melanda dunia pendidikan kita sekarang dan kenyataan hidup di masyarakat. Memang berbagai ahli komunikasi baik dalam kajian-kajian teoritik maupun lontaran-lontarannya di media massa menyatakan bahwa komunikasi merupakan unsur hakiki untuk memecahkan masalah. Namun mereka belum menjamah atau menyentuh perihal komunikasi yang bagaimanakah yang berindikasikan pendidikan. Padahal komunikasi apapun yang dilakukan jika tidak berindikasikan pendidikan akan melahirkan kepatuhan semu dari pihak yang menerima pesan. Ini dapat dibaca dari kehidupan sehari-hari dari semakin meningkatnya oknum penguasa, guru atau dosen, dan tokoh masyarakat yang kehilangan kepercayaan di mata masyarakat sehingga apa yang dikomunikasikan atau didialogkan dianggap angin lalu. Kalau pun mereka melaksanakan perintah, itu hanyalah karena ketakutan terhadap kekuasaannya yang justru dapat melahirkan pertentangan-pertentangan.

MASALAH PENDIDIKAN

Dalam pengantar telah disinggung permasalahan kehidupan dan pendidikan yang menjadikan upaya orang dewasa tidak dapat dinyatakan berindikasi pendidikan, yaitu tidak adanya kepercayaan dalam diri subyek yang dibantu untuk mematuhi apa yang diinginkan. Ada beberapa hal yang diduga menjadi sumbernya, yakni: (1) paradigma yang digunakan oleh guru atau dosen yang menyatakan bahwa tugas mereka hanyalah menyampaikan isi pesan; (2) degradasi moralitas masyarakat sehingga pelanggaran moral dipandang sebagai perbuatan yang biasa; (3) menjamurnya kehidupan yang berdasarkan paham pasca-modernisme; dan (4) kelemahan sistem pendidikan serta belum adanya kontrol hukum terhadap perilaku yang melanggar nilai moral untuk ditindak secara tegas.

Paradigma yang dipakai oleh para guru dan dosen dalam sistem pendidikan kita ini diduga berasal dari Amerika, yaitu paradigma neo-pragmatisme. Pada paradigma ini yang dipentingkan adalah nilai kebergunaan (bukan kebermaknaan) dan kepuasan, termasuk kepuasan yang bersifat *hedonistik*. Dengan paradigma ini guru atau dosen tidak melihat lebih jauh upayanya: apakah telah *bermakna* untuk subyek didik, ataukah sekadar *berguna* saja. Dengan pemakaian paradigma ini guru atau dosen menganggap dirinya hanya menyampaikan pesan kepada subyek didik yang lebih dititikberatkan pada kebergunaan untuk kehidupan yang bersifat praktis (pemakaian ilmu demi kemudahan kehidupan), sehingga sekarang timbul gagasan pendidikan yang memuja jurus *link and match* sebagai tema

sentralnya. Ini merupakan bukti bahwa dalam sistem pendidikan kita fokus utamanya adalah *keserasian dan kesepadanan* terhadap dunia kerja.

Konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat pendidikan dan masyarakat luas adalah menjamurnya sistem pendidikan yang hanya mengejar kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi dalam tataran kebergunaan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, para perancang dan pelaku sistem pendidikan kita memfokuskan diri pada tataran kebergunaan pendidikan untuk dunia kerja, dengan melupakan tataran hakiki yang seharusnya menjadi perhatian utama, yakni *kebermaknaan upaya pendidikan dalam diri subyek didik untuk melaksanakan hidup dan kehidupan yang manusiawi*.

Dengan pengajaran tersebut, dunia pendidikan kita kurang atau tidak mempersyaratkan seorang guru atau dosen memiliki integritas moral sehingga sejak awal telah ada yang menimbulkan masalah. Ini dapat dilihat dari kenyataan adanya perilaku tak terpuji dari sebagian pendidik, misalnya guru memperkosa muridnya, dosen melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya, mahasiswa menjiplak karya tulis mahasiswa lainnya, dan dosen menjiplak karya tulis mahasiswa atau dosen lainnya untuk naik pangkat. Yang lebih parah lagi adalah bahwa yang diupayakan oleh guru atau dosen dalam pesan yang *sarat nilai* tidak lagi digubris oleh subyek didik, yang melahirkan perilaku yang melanggar nilai-nilai moral dan dianggap sebagai perilaku yang "wajar" dan "biasa". Perilaku-perilaku ini, meskipun makin gencar dicegah, akar masalahnya tidak segera ditanggulangi sehingga hasilnya bersifat sesaat, misalnya pelanggaran itu tidak dilakukan hanya jika sedang ada operasi.

Degradasi moralitas masyarakat diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah pendidikan. Perilaku-perilaku para oknum masyarakat, penguasa, penegak hukum, guru dan dosen yang tidak konsisten terhadap nilai-nilai moral dalam aturan-aturan permainan telah merupakan bahan dialog antar subyek pendidikan. "Tatanan baru" (pelanggaran-pelanggaran tersebut) menjadi lahan dialog dan sekaligus lahan dialektikanya untuk memahami, mengendapkan, dan mempribadikan dalam dirinya agar dapat menggantikan nilai-nilai lama. Dengan demikian, ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai moral kemudian digantikan dengan ketaatan terhadap "tatanan-tatanan baru" sehingga mereka juga berperilaku yang melanggar nilai-nilai moral.

Uraian tersebut dapat dipahami dengan perspektif sosiologi pengetahuan dari Berger dan Luckman (1990) bahwa kemampuan berpikir dialektis terhadap tesis, antitesis, dan sintesis dapat berlangsung dalam proses tiga momen secara simultan. Ketiga momen dimaksud adalah eksternalisasi (penyesuaian diri dengan

dunia sosiokultural sebagai produk manusia), obyektivasi (interaksi sosial dalam dunia antarsubjektif dan dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi), dan internalisasi (identifikasi diri dengan kelembagaan sosial tempat individu menjadi anggotanya). Dengan kemampuan pemikiran dialektis dalam tiga momen tersebut maka tatanan baru yang didialektikkan mungkin saja tetap mengukuhkan nilai-nilai moral atau sebaliknya. Namun dengan menggunakan perspektif psikologis anak remaja, yang masih labil jiwanya dan belum memiliki arah dan dasar yang jelas dalam berperilaku, kemungkinan besar akan menggantikan nilai-nilai moral ("lama") dengan tatanan baru tersebut sehingga kian meningkatkan frekuensi dan kualitas perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai moral.

Paham posmo yang melanda dunia sekarang telah merusak tatanan nilai-nilai moral yang absolut, karena dalam paham tersebut tidak diperhatikan lagi adanya fakta historis dalam kehidupan manusia. Yang diutamakan hanyalah kenyataan fakta masa kini (sekarang). Dengan kenyataan masa kini manusia seolah-olah diberi kewenangan penuh untuk mengadakan destruksi-destruksi terhadap tatanan yang ada.

Paham tersebut melahirkan *budaya pop* yang bersifat massal, temporer, dan tidak mengacu kepada nilai-nilai moral seperti *kumpul kebo*, homoseksualitas dan lesbianisme, dan pelanggaran nilai-nilai moral lainnya yang menurut posmo merupakan perilaku yang "sah". Ini ada kemiripannya dengan landasan filosofis seni yang menyatakan bahwa dalam eksploitasi keindahan diperbolehkan adanya pengabaian nilai-nilai moral yang bersifat umum dan universal. Banyak seniman yang hanya memfokuskan diri pada nilai keindahannya, misalnya dengan menyatakan bahwa untuk menunjukkan keindahan tubuh maka bertelanjang (bugil) bukan dianggap pornografi. Jika fenomena-fenomena ini dibiarkan tanpa ada campurtangan atau "rekayasa" maka akan lahir generasi-generasi yang akrab dengan perilaku yang melanggar nilai-nilai moral.

Keadaan itu menyiratkan adanya kelemahan sistem pendidikan dan belum berjalannya kendali hukum terhadap perilaku yang melanggar nilai moral. Kelemahan yang mendasar dalam sistem pendidikan adalah adanya kecenderungan mengejar target penguasaan ilmu dan keterampilan atau keahlian untuk kepentingan dunia kerja sehingga tujuan pendidikan yang hakiki terlupakan. Ini dapat dilihat dari indikator sekolah-sekolah yang selalu mengejar tingginya Nilai Ebtanas Murni (NEM) subyek didik dan aspek-aspek keterampilan dan pengetahuan untuk kepentingan dunia kerja. Dengan pengejaran ini sebagian besar upaya pendidikan tersedot untuk kepentingan dunia kerja sehingga tujuan pendidikan yang hakiki, yakni mengupayakan agar subyek didik memiliki pribadi yang utuh dan terintegrasi, menjadi terlupakan.

Uraian tersebut secara tersurat dan tersirat menandakan bahwa pendidikan melupakan aspek nilai-nilai moral. Karena itu, upayanya terfokus pada persiapan subyek didik untuk dunia kerja atau mengejar NEM yang tinggi. Dalam persyaratan untuk kelulusan subyek didik dituntut memperoleh hasil yang tinggi. Ini merupakan kenyataan yang kontradiktif dalam pendidikan, sehingga terbuka peluang bagi munculnya "praktik-praktik" pendidikan yang kurang terpuji, misalnya subyek didik yang memiliki hasil belajar bidang moral yang rendah "dikontrol" nilainya untuk memenuhi standar yang ditentukan.

Diabaikannya nilai-nilai moral dalam upaya pendidikan juga dapat dibaca dari pengalokasian bidang kajian tersebut yang memperoleh porsi yang sangat kecil. Sebenarnya dalam situasi serta kondisi sekolah sekarang dimungkinkan adanya peluang yang lebih besar untuk memusatkan perhatian kepada pengajaran-pengajaran bernilai moral. Pengabaian ini membuat para perancang, pendidik, dan pelaksana pendidikan tidak menyadari bahwa dirinya kurang mengindahkan nilai-nilai moral yang diperlukan bagi proses interaksi dengan subyek didik sehingga dapat menimbulkan *krisis wibawa*. Karena pendidik tidak dipersyaratkan memiliki integritas pribadi, nilai-nilai moral, dan keilmuan yang sarat dengan etika moral, maka konsekuensinya kontrol terhadap dua hal tersebut semakin kendor sehingga pelanggaran dianggap sebagai hal yang "wajar". Anggapan tentang kewajaran perilaku ini dapat dibaca dari ungkapan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap nilai moral, tanggapan yang dilontarkan hanya sampai pada tingkat "keprihatinan" dari pihak yang memiliki wewenang untuk meluruskannya.

Sayangnya, keadaan tersebut di atas masih ditunjang oleh belum berlakunya hukum untuk menindak secara tegas oknum penguasa dan tokoh masyarakat yang melanggar nilai-nilai moral. Ini merupakan ironi terhadap praktik pengawasan melekat atas pelanggaran nilai-nilai moral. Masih berlangsungnya budaya korupsi, manipulasi, kolusi, dan penyimpangan moral lainnya yang "lekat". Makna dari perilaku penyimpangan yang dikatakan "lekat" merupakan ciri khas dari kebobrokan sistem. Kebobrokan tersebut merupakan lahan dielektika bagi subyek didik sehingga sejak usia remaja atau bahkan sejak usia dini telah bergumul dengan kondisi negatif tersebut yang memungkinkan mereka melakukan identifikasi dan peniruan yang pada gilirannya menyatu dalam dirinya. Dengan demikian, jika mereka melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, maka mereka akan menganggapnya sebagai hal yang "wajar-wajar" saja.

PENDEKATAN FENOMENOLOGI UNTUK MENDESKRIPSIKAN MASALAH PENDIDIKAN

Masalah yang diuraikan di atas perlu didekati dengan pendekatan yang dapat menyingkap struktur dasar penyebab permasalahannya. Pendekatan yang dapat menyingkap adalah pendekatan fenomenologis karena dapat menyingkapkan penyebab utama dari fenomena yang tersirat dalam yang tersurat (makna di balik peristiwa-peristiwa atau permasalahan terhadap tampilan kenyataan yang aktual).

Fenomenologi pada awalnya merupakan aliran filsafat yang tokoh utamanya adalah Husserl (1990). Fenomenologi berasal dari akar kata "phenein" yang mengandung arti sinar, cahaya atau sesuatu yang memancar (Drijakara, 1981). Akar kata itu kemudian dibentuk menjadi kata kerja yang berarti tampak, dapat dilihat karena bercahaya. Darinya kemudian lahir kata "phenomenon" yang berarti yang "tampak" yang dalam bahasa Indonesia digunakan istilah "gejala" (Soelaeman, 1985). Dalam fenomenologi ada keyakinan bahwa pengamat dapat melihat benda atau permasalahan "yang sebenarnya" dalam fenomenon itu. Untuk dapat melihat dan mengkaji "masalah yang sebenarnya" dalam pendidikan perlu adanya *intensionalitas* (mengarahnya kesadaran kepada bukti-bukti) dari pengamat yang kemudian menuangkannya pada realitas masalahnya. Aktivitas kesadaran itu disebut *konstitusi*. Artinya, sesuatu yang kita "lihat" (yaitu masalah) tidak terlepas dari "kemelihatannya" kita kepada masalah itu. Sebaliknya, "kemelihatannya" kita kepada masalah itu tidak pula terlepas dari "keterlihatannya". Dengan kata lain, terjadi pola pertautan antara subyek yang mengamati dengan subyek yang diamati sehingga hubungannya disebut *hubungan konsubyek* (Dithley, 1990; Husserl, 1990; dan Haidegger, 1990). Oleh karena itu, untuk menginterpretasikan struktur dasar masalah pendidikan diperlukan kesatu-dunia-an antara subyek yang mengamati dan subyek yang diamati.

Penghayatan yang sama antara subyek yang diamati dengan subyek yang mengamati, yang membuat pengamat (peneliti) dapat menyingkapkan masalah yang sebenarnya, diperoleh dari langkah-langkah sebagai berikut: (1) memahami kondisi obyektif yang "dikomunikasikan" oleh masalah pendidikan; (2) memahami kondisi subyektif yang "dikomunikasikan" oleh masalah pendidikan. Pada pengertian pertama, pengamat mengadakan tafsiran terhadap masalah pendidikan dengan apa yang disebut tafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*) dan menemukan makna kata dalam hubungannya dengan materi dan konteks kerja melalui tafsiran historis (*historical interpretation*). Sedangkan dalam pengertian yang kedua pengamat mengadakan tafsiran individual (*individual interpretation*)

dan tafsiran generik (*generic interpretation*) (Boech:1990). Dari tafsiran yang terakhir inilah baru dapat disingkapkan struktur dasar atau hakikat suatu masalah pendidikan.

Soelaeman (1985) mengemukakan empat langkah dalam membaca dan menyingkapkan struktur dasar masalah pendidikan atau yang melingkupi, yaitu: (1) mengarahkan perhatian kepada fenomena masalah pendidikan dari pengalaman, sebagaimana penampakkannya; (2) pengamat harus mendeskripsikan dan tidak diperkenankan menerangkan; (3) "menghorisontalkan" atau memberikan bobot yang sama terhadap fenomena-fenomena yang secara langsung menampilkan diri; dan (4) mencari dan meneliti struktur dasar yang tak beraneka dari fenomena itu. Selanjutnya Soelaeman (1985) memberikan arah dalam menafsirkan suatu masalah untuk mencari struktur dasarnya dengan jalan: (1) deskripsi fenomena-fenomena yang menampilkan diri; (2) deskripsi tersebut direduksi secara fenomenologis (langkah *epoche*) yang berarti bahwa ada beberapa fenomena yang sengaja "ditanggihkan" karena tidak hakiki atau hanya terjadi secara aksidental menurut posisi dan kondisi, yang hanya dihadapi sekarang ini, di tempat ini, dan pada kesempatan ini; dan (3) reduksi *eiditos* yang bertujuan untuk menyingkapkan struktur dasarnya.

Dengan pembacaan masalah pendidikan dan yang melingkupinya yang menggunakan pendekatan fenomenologi maka dimungkinkan dapat disingkapkan struktur dasar atau akar permasalahannya sehingga pemecahan yang ditawarkan tidak bersifat artifisial atau sesaat, melainkan bersifat hakiki.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan manusia dapat dikatakan tindakan pendidikan manakala didasari oleh kesadaran untuk memberikan bantuan kepada subyek didik dan memaknainya. Tindakan tersebut dimaknai oleh subyek didik jika pendidik memiliki wibawa yang diakui oleh mereka. Oleh karena itu, krisis wibawa pendidik di mata subyek didik merupakan masalah hakiki dalam pendidikan, karena upayanya tidak dimaknai oleh anak. Pendekatan yang dapat menyingkap masalahnya adalah fenomenologi, karena pendekatan ini dapat menyingkap penyebab utama dari fenomena yang tersirat dalam yang tersurat. Dengan demikian, pemecahan yang ditawarkan tidak bersifat artifisial atau sesaat, melainkan bersifat hakiki.

DAFTAR RUJUKAN

- Berger, P.L., dan Luckman, T. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Boeckh, P.A. 1990. Philological Hermeneutics. Dalam Vollmer, K.M. (Editor). 1990. *The Hermeneutics Readers*. Lexington Avenue, New York: The Continuum Publishing Company.
- Dilthey W. 1990. The Hermeneutics of Human Sciences. Dalam Vollmer, K.M. (Editor). 1990. *The Hermeneutics Readers*. Lexington Avenue, New York: The Continuum Publishing Company.
- Drijarkara, N. 1981. *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Heidegger M. 1990. Phenomenology and Fundamental Ontology: The Disclosure of Meaning. Dalam Vollmer, K.M. (Editor). 1990. *The Hermeneutics Readers*. Lexington Avenue, New York: The Continuum Publishing Company.
- Husserl, E. 1990. The Phenomenological Theory of Meaning and of Meaning-Apprehension. Dalam Vollmer K.M. (Editor). 1990. *The Hermeneutics Readers*. Lexington Avenue, New York: The Continuum Publishing Company.
- Soelaeman, M.I. 1985. *Suatu Upaya Pendekatan Fenomenologis terhadap Situasi Kehidupan dan Pendidikan dalam Keluarga dan Sekolah*. Bandung: FPS IKIP Bandung.